

KABUPATEN DONGGALA – PROFIL KERENTANAN BENCANA ALAM

Profil ini merupakan penjelasan singkat mengenai kerentanan lingkungan Alam, Buatan, Sosial, dan Ekonomi Kabupaten Donggala terhadap ancaman bencana alam. Inisiatif Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan oleh pemerintah lokal juga dijelaskan dalam profil ini.

2016



Mengingat sebagian besar masyarakat di Kabupaten Donggala bertempat tinggal di atau dekat pantai, potensi bencana alam di wilayah pesisir adalah masalah yang paling sering terjadi di kabupaten Donggala



LINGKUNGAN ALAM

Kabupaten Donggala terletak di Provinsi Sulawesi Tengah bagian barat di pulau Sulawesi, Indonesia. Panjang wilayahnya dari utara ke selatan hampir mencapai 300 km. Luas wilayah kabupaten ini adalah 5.275 km². Kota Palu memisahkan bagian paling selatan kabupaten ini menjadi dua. Sebagian besar bentang alamnya terdiri atas perbukitan terjal dan tinggi dengan dataran pantai yang rendah memanjang ke arah Selat Makassar dan Selat Palu.

Potensi Bahaya dan Risiko

Terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Donggala masuk dalam kawasan lempeng tektonik aktif, terutama dengan keberadaan Sesar Palu-Koro. Oleh karena itu, kabupaten ini berpotensi mengalami gempa bumi besar, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Kabupaten Donggala memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menduduki peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki resiko bencana (BNPB 2013).



Kerentanan Lingkungan Alam

Kondisi topografi yang terjal di Kabupaten Donggala, menyebabkan sebagian besar areanya memiliki potensi rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini pada akhirnya juga menyebabkan sejumlah besar endapan sedimen (tanah dan batuan) hasil dari longsor, debris dan erosi mengisi dasar sungai dan menyebabkan potensi bencana banyak banjir lebih besar serta pertambahan endapan sedimen di daerah pesisir. Selain itu di daerah pesisir pantai, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi garam dari gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Donggala selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perubahan iklim di masa depan mungkin akan meningkatkan keparahan banjir dan kekeringan.

Table 1. Assessment of risk from hazards for Donggala Regency (Disaster Risk Index – 2013).

Potensi Bahaya	Gempa	Tsunami	Banjir	Tanah Longsor	Abrasi Pantai	Kebakaran Hutan	Cuaca Ekstrem	Kekeringan
Risiko	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

KERENTANAN SOSIAL DAN BUDAYA

Jumlah penduduk Kabupaten Donggala pada tahun 2012 mencapai 284.113 jiwa. Ibu kota kabupaten, Kecamatan Banawa, adalah daerah yang paling padat penduduknya di Donggala dengan kepadatan 330 jiwa per km².

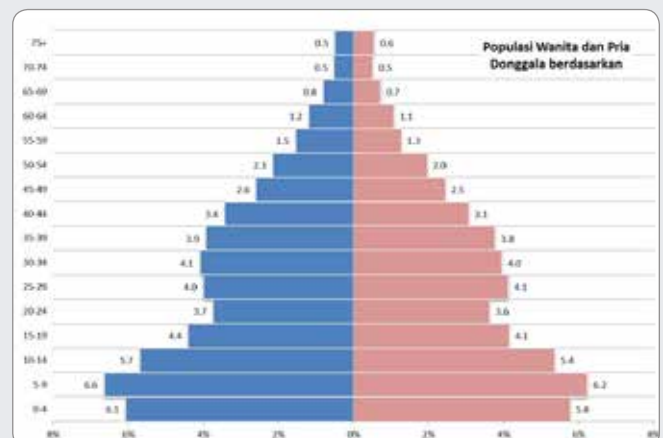
Populasi Penduduk Usia Muda

Sebagian besar penduduk Kabupaten Donggala berusia muda. Penduduk usia muda dapat lebih rentan terhadap bencana, tetapi penduduk usia muda justru memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan mengenai bahaya dan risiko melalui sekolah. Oleh karenanya, media sosial adalah model pendidikan yang bagus untuk anak-anak dan pemuda.

Migrasi

Sekurang-kurangnya 13% dari populasi Donggala adalah penduduk yang berasal dari luar daerah, baik melalui migrasi spontan atau pun transmigrasi. Para migran tersebut lebih rentan terhadap bencana karena kurangnya pengetahuan mereka tentang bahaya alam lokal dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang telah ada. Seringkali mereka tidak terbiasa dengan kebiasaan setempat atau norma-norma sosial, sehingga terdapat kecenderungan dapat menyebabkan konflik sosial di beberapa kecamatan.

Mayoritas penduduk beragama Islam dengan Kecamatan Pinembani sebagai satu-satunya kecamatan yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam.



LINGKUNGAN EKONOMI

Pertanian yang Lemah

Meskipun ada berbagai macam industri berskala kecil di Donggala, lebih dari 95% kegiatan ekonomi di kabupaten ini berhubungan dengan pasir dan batu kerikil. Ketergantungan pada satu sektor pertambangan ini menjadikan kabupaten ini sangat rentan terhadap bahaya seperti aliran debris, banjir, dan sedimentasi yang bisa mengganggu kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, kegiatan pengerukan memperburuk ketidakstabilan tepi sungai dan menimbulkan erosi lebih lanjut.

Pengelolaan Daerah Resapan Air

Kerusakan hutan, baik karena penebangan legal dan ilegal serta pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan ditengarai dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah resapan air. Kegiatan tersebut telah meningkatkan dan memusatkan aliran air di permukaan, meningkatkan potensi erosi dan kemungkinan terjadinya aliran debris yang dapat berdampak pada daerah hilir.

LINGKUNGAN BUATAN

Konstruksi dan Pengawasan Pembangunan yang Buruk

Banyak bangunan dan pembangunan di Kabupaten Donggala tidak memiliki izin dan juga sering tidak mematuhi perencanaan tata ruang serta peraturan pembangunan. Kondisi tanah, termasuk potensi bahaya, sering tidak dipertimbangkan sebelum pembangunan. Hal ini mengakibatkan banyak bangunan berisiko runtuh saat gempa terjadi, yang disebabkan oleh adanya likuifaksi atau banjir. Banyak rumah juga terletak di dataran rendah pesisir pantai atau dekat saluran sungai sehingga berisiko terkena bencana banjir dan erosi.

Infrastruktur yang Rentan

Jalan, jembatan, rumah ibadah, sekolah, dan rumah-rumah belum tentu dibangun untuk dapat bertahan ketika ada potensi bahaya banjir, longsoran gempa bumi. Jalan dan jembatan rentan terhadap erosi, longsor, dan aliran debris. Hal tersebut perlu menjadikan perhatian ekstra karena adanya keterbatasan akses jalan menuju Kabupaten Morowali, sehingga ketika terjadi bencana dan menutup akses jalan atau merusak jembatan, tidak ada rute alternatif untuk penyaluran bantuan atau sumber daya

KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Anggaran Pengelolaan Risiko Bencana pada tahun 2016 sebesar 9,8 milyar rupiah (746 ribu dolar Amerika) dan telah mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2011. DPRD Kabupaten Donggala memberikan dukungan positif terhadap Program Pengelolaan Risiko Bencana.

Koordinasi

Meskipun telah ada sistem untuk memfasilitasi kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui regulasi dan pembentukan BPBD; pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi PRB di Kabupaten Donggala masih memerlukan perbaikan. Dalam diskusi telah teridentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dan pengetahuan tentang kegiatan PRB masih kurang, sehingga masyarakat menjadi lebih bergantung pada pemerintah.

Ada kerjasama antara instansi pemerintah dan LSM, tetapi ada peluang bagi LSM untuk lebih efektif digunakan dalam kegiatan pelatihan dan simulasi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam inisiatif PRB masih perlu ditingkatkan.

Tanggung Jawab PRB

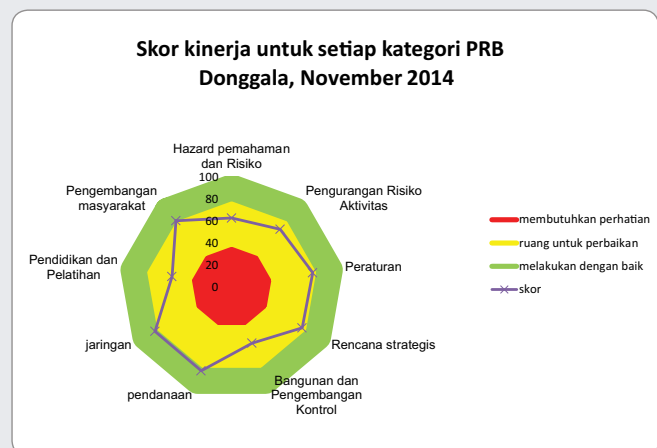
Instansi pemerintah selain BPBD, sektor swasta, dan masyarakat di Donggala belum memahami dengan baik bahwamereka memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, kegiatan PRB tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak terintegrasi di seluruh kelompok dan lembaga ini. Para pemangku kepentingan biasanya memiliki pandangan bahwa pengelolaan risiko bencana adalah tanggung jawab pemerintah, terutama BPBD.

Pengawasan dalam Pembangunan dan Pendirian Bangunan

Hasil Survey Penilaian Diri Pemerintah Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Diri Pemerintah Daerah (LG-SAT) menunjukkan bahwa pengawasan dalam pembangunan dan pendirian bangunan perlu diperkuat. Hal ini terutama terkait dengan praktik pembangunan yang buruk dan kurangnya pengawasan pembangunan seperti yang telah dibahas di bagian lingkungan buatan.



Sumber : BPBD Donggala, 2016



Sumber : Diagram Hasil Survey Penilaian Diri Pemerintah Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Diri Pemerintah Daerah (LG-SAT) yang memberikan gambaran ringkas mengenai kelebihan dan kelemahan kondisi PRB di Kabupaten Donggala, November 2014.

TENTANG StIRRRD

PENGUATAN KETAHANAN INDONESIA MELALUI PENGURANGAN RISIKO BENCANA



Kegiatan ini kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan GNS Science didukung oleh Program Bantuan New Zealand, untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari bencana alam melalui peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana oleh pemerintah lokal dan universitas lokal. Program ini meliputi sepuluh kabupaten/kota dan melibatkan universitas local untuk memahami isu tentang pengurangan risiko bencana di daerahnya, membantu kemampuannya dalam memahami dan mengelola isu tersebut, kemudian menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana dan implementasinya di lapangan.

Salah satu kunci utama disini adalah meningkatkan kerjasama antara insititusi (SKPD) di pemerintah daerah, universitas lokal dan pihak swasta dimana akan membangun pendidikan dan program penelitian dalam aspek pengelolaan bencana untuk membantu masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah terlibat secara aktif baik dalam perencanaan maupun implementasinya dan saling mendukung serta berbagi pengalaman dari seluruh daerah yang termasuk dalam program ini. Kegiatan ini didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, BAPENAS dan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber:

BNPB, 2013. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*.

BPS, 2013. *Kabupaten Donggala Dalam Angka 2013*.

BPBD Kabupaten Donggala, 2014. *Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Donggala*.

Catatan dari *Workshop Kunjungan Awal StIRRRD (24 November 2014)*

Catatan dari *Workshop Penyusunan Rencana Aksi StIRRRD (26 Februari 2015)*.

Catatan dari *Kelompok Diskusi Perempuan Terfokus StIRRRD (28 Februari 2015)*.

Catatan dari *Workshop Finalisasi Rencana Aksi StIRRRD (23 Februari 2016)*.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

<http://StIRRRD.org> or

HUBUNGI:



Michele Daly

Risk and Society Department
GNS Science
Wellington, New Zealand
m.daly@gns.cri.nz



Dr. Teuku Faisal Fathani

Department of Civil and
Environmental Engineering
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
tfathani@ugm.ac.id



Richard Woods

Risk & Society Department
GNS Science
Wellington, New Zealand
r.woods@gns.cri.nz



Dr Agung Setianto

Geological Engineering
Department
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
agung_setianto@ugm.ac.id



NEW ZEALAND
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & TRADE
Aid Programme

